



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

Nomor : 900/782/BPKAD/2019  
Tanggal : 19/09/2019

No. Koreksi : 518

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
Tentang : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 900/71/BPKAD/2019 tentang Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
<u>Hamka</u>	<u>Yusuf</u>
Catatan :	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDHM-HPAY 02/12/1911:44



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR 900/71/BPKAD/2019 TENTANG PENGURUS BARANG  
PENGUNA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian pengurus barang pada pengguna barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu melakukan penyusaian terhadap Keputusan Wali Kota Palu tentang Pengurus Barang pada Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 900/71/ BPKAD/ 2019 tentang Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 900/71/BPKAD/2019 tentang Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotocopy/ salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulanyang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal



 WAKIL WALI KOTA PALU, 

 SIGIT PURNOMO


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 WALI KOTA NOMOR 900/71/  
 BPKAD/ 2019 TENTANG  
 PENGURUS BARANG PENGGUNA  
 BARANG MILIK DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019

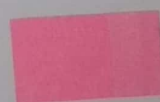
NO	Pengurus Barang Pengguna	Perangkat Daerah
1.	Ilham, S.AP Nip.19720726 200801 1 005	Sekretariat Daerah Kota Palu
2.	Nurdin, SE Nip.19730906 201001 1 004	Sekretariat DPRD Kota Palu
3.	Andi Nirwan Nip.19830713 201407 1 003	Inspektorat Daerah Kota Palu
4.	Hermansyah Nip.19850126 201407 1 001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
5.	Ramdan Nip.19850520 201407 1 001	Dinas Kesehatan Kota Palu
6.	Moh. Hafiluddin, A.Md Nip.19820322 201001 1 008	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
7.	Mayasari, SE Nip.19820706 200801 2 016	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
8.	Fandi Ahmad Nip.19860712 200801 1 004	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
9.	Meyske Nip.19860628 201212 2 001	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
10.	M. Nasir Nip.19820519 200801 1 005	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
11.	Rio Wijaya, SE Nip.19861206 201407 1 001	Dinas Sosial Kota Palu
12.	Armin, SE Nip.19830520 200801 1 009	Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu
13.	Astuti, A.Md Nip.19761011 201407 2 001	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
14.	Ardiansyah, S.Sos Nip.19831008 200312 1 004	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
15.	Hikmah Nip.19830525 201409 2 006	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
16.	Muhammad Sukri Nip.19841028 201212 1 003	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu
17.	Gusti Alamsyah Nip.19721124 200801 1 007	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palu
18.	Tivani Dianisah Nip.19860814 200801 2 004	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
19.	Sultan, S.Sos Nip.19820106 200701 1 013	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu
20.	Andi Maddennuang P., SH Nip.19760804 200804 1 001	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

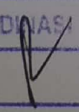
PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

21.	Jumrawam Nip.19781027 200604 1 016	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
22.	Mohamad Ridwan, SH Nip.19820317 200801 1 012	Dinas Pariwisata Kota Palu
23.	Hadi Parnanto Yunus, A.Md. LLAJ Nip.19960327 201804 1 001	Dinas Perhubungan Kota Palu
24.	Moh. Yamin Nip.19800701 200212 1 004	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
25.	Sulastri Nip.19810629 201407 2 001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
26.	Wilda Nur Nip. 19751214 200801 2 008	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Palu
27.	Fadli, S.Sos Nip.19841202 200801 1 008	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
28.	Andi Irawan Nip.19761218 200701 1 012	Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
29.	Hapsanah, SE Nip.19811001 200801 2 014	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu
30.	Candra Nip.19781019 201407 1 001	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
31.	Dwi Susanthi Nip.19791025 200012 2 001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
32.	Reski Amalia Nip.19841027 201407 2 001	Rumah Sakit Umum Anuta Pura Kota Palu
33.	Usman Nip.19760217 201407 1 002	Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu
34.	Emil Melvin Nip.19820428 201407 1 003	Kecamatan Palu Barat
35.	Wiwit Wirawan Nip.19800422 201407 1 001	Kecamatan Palu Timur
36.	Isma'ul Akib Nip.19841128 200801 1 004	Kecamatan Palu Selatan
37.	Ulul Amri Tahir, S.Ip Nip. 19790212 201001 1 014	Kecamatan Palu Utara
38.	Makmur Nip.19811201 201406 1 006	Kecamatan Ulujadi
39.	Siti Ramlah Selamat Nip.19830818 201212 2 002	Kecamatan Tatanga
40.	Memed Aryawijaya Nip. 19801225 200801 1 018	Kecamatan Mantikulore
41.	Novilisda Nip.19841120 201411 2 003	Kecamatan Tawaeli

 WAKIL WALIKOTA PALU,

WR SIGIT PURNOMO



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	